



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : A. Hermanto Dardak  
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono  
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua**

Jakarta, Januari 2016

**Pihak Pertama**

**M. BASUKI HADIMULJONO**

**A. HERMANTO DARDAK**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1) PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH</b>			
1	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	1 Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR dalam kawasan  2 Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar kawasan di dalam WPS  3 Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar WPS	84%  83%  82%
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	1 Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan, dan antar WPS  2 Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) - disparitas kebutuhan dengan pemrograman	85%  84%

**Program :**

- Pengembangan Infrastruktur Wilayah

**Anggaran**

Rp. 500.312.500.000

JAKARTA,      **JANUARI 2016**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**M. BASUKI HADIMULJONO**

**KEPALA BADAN  
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

*M. Hermanto*

**A. HERMANTO DARDAK**